**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) DALAM PENGELOLAAN JEMBATAN PENYEBERANGAN
ORANG (JPO) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

Oleh : Andang Eka Putra

Email : andang140697@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The presence of pedestrians at a certain level will result in sharp conflicts with the flow of vehicles which in turn results in traffic congestion and high levels of accidents, so that the provision of infrastructure and facilities for pedestrians who meet the requirements of security, comfort, safety and which can minimize conflicts between pedestrians and vehicles, minimizing traffic delays is needed. The crossing facility is an alternative in crossing problems used by pedestrians, one of which is the crossing bridge facility. Therefore, for the sake of pedestrian safety in Pekanbaru City, one of the efforts of the Pekanbaru City Government through the BPKAD of Pekanbaru City by managing the Crossing Bridge Person.

This study aims to describe the implementation of the BPKAD function of Pekanbaru City in the management of People's Crossing Bridges, then also to find out the inhibiting factors for the non-optimal implementation of the Pekanbaru City BPKAD functions in the management of People's Crossing Bridges. The location of the study was conducted in Pekanbaru City, first at the BPKAD office in Pekanbaru City, Pekanbaru Transportation Agency. And 11 points of the Crossing Bridge location. Furthermore, data collection techniques were carried out with interviews and documentation.

The results of this study are the implementation of the function of BPKAD Pekanbaru City in the management of People's Crossings as an effort to maintain JPO and pedestrian safety in Pekanbaru City has not been running optimally. This is caused by several factors such as the absence of a budget for JPO management, the private sector never submits JPO, and JPO ownership documents are incomplete.

Keywords: managing pedestrian bridges, Pedestrian, function implementation, coordination

A. PENDAHULUAN

A1. Latar Belakang

Keberadaan penyeberang jalan pada tingkat tertentu akan mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaraan yang pada gilirannya berakibat kemacetan lalu lintas dan tingginya tingkat kecelakaan, sehingga penyediaan prasarana dan sarana bagi pejalan kaki yang memenuhi persyaratan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan yang dapat meminimalkan konflik antara penyeberang jalan dan kendaraan, memperkecil tundaan lalu lintas sudah sangat diperlukan. Fasilitas penyebrangan merupakan salah satu alternatif dalam permasalahan penyebrangan yang digunakan oleh para pejalan kaki,¹ salah satunya adalah fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang.

Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki sebagai masyarakat yang berhak menggunakan fasilitas umum, telah dibangun Jembatan Penyeberangan orang di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Pekanbaru, Bab V pasal 11 yang menjelaskan bahwa “Jembatan Penyeberangan Orang dapat dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan zebra cross dan pelikan cross sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
2. Pada ruas jalan dimana frekuensi terjadi kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
3. Pada ruas jalan mempunyai arus lalu lintas pejalan kaki yang tinggi, serta arus kendaraan memiliki kecepatan tinggi.²

¹ Hariman Hakim Harahap. “Analisa Karakteristik Penggunaan Jembatan Penyeberangan pada Daerah Perbelanjaan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. Vol. 2, No. 1, Maret 2014. Hal. 146

² Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013

Anjuran penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 130 ayat 3 yang berbunyi setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan diwajibkan menggunakan sarana jembatan penyebrangan, zebra cross ataupun tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat menyeberang yang ditunjukkan dengan fasilitas perambuan.³

Jembatan Penyeberangan Orang merupakan salah satu fasilitas yang melengkapi tata tertib lalu lintas negara ini, tujuan adanya fasilitas pejalan kaki adalah menjamin tingkat keamanan para pejalan kaki. Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat Jumlah JPO di Kota Pekanbaru ada 11 Unit, berikut ini adalah profilnya :

Tabel 1.1
Profil Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru

No	Posisi JPO	Tahun dibangun
1	Depan took Modelux	2011
2	Depan Plaza Sukaramai	2004
3	Depan Rs. Awal Bros	2004
4	Depan Sudirman Square	2004
5	Depan Ratu Mayang Garden	2011
6	Depan GOR MTQ	2011
7	Depan toko Hawaii	-
8	Depan simpang Jl. Pelajar	2011
9	Depan Giant Panam	2011
10	Depan SD Tabek Gadang	2009
11	Simpang Tabek Gadang	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan fungsi BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kota Pekanbaru pada pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa bidang pengelolaan aset dalam melaksanakan tugas

³ Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menyelenggarakan 8 fungsi. 8 fungsi tersebut merupakan fungsi yang tertuju kepada pengelolaan seluruh aset daerah yang terdapat di Kota Pekanbaru, sedangkan dalam hal pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang, BPKAD tidak melaksanakan semua fungsi tersebut melainkan hanya 4 fungsi saja, yaitu :

1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dalam pengelolaan aset daerah.
3. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan pengamanan dokumen kepemilikan, penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian aset daerah.

BPKAD belum melaksanakan 4 fungsi tersebut secara optimal, sehingga Jembatan Penyeberangan Orang di Pekanbaru memiliki banyak permasalahan. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut :

1. BPKAD Kota Pekanbaru belum efektif melaksanakan fungsi pengadaan, sehingga banyak Jembatan Penyeberangan Orang menjadi tidak tepat guna.
2. Tidak optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru
3. Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan dan pengamanan dokumen kepemilikan Jembatan

Penyeberangan Orang oleh BPKAD Kota Pekanbaru

4. Tidak adanya anggaran untuk pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru

A2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan penulis diatas, maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yakni Mengapa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak Melaksanakan Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru tahun 2018 secara optimal ?

A3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru Tahun 2018.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

A4. Kerangka Teori

Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya berhubungan dengan manajemen materi dan manajemen perlengkapan daerah. Manajemen materi adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materi/produksi.⁴ Pengelolaan aset daerah mencakup banyak

⁴ E Koswara, *Teori Pemerintahan Daerah*, IIP Press, Jakarta, 2001, Hlm. 32

aspek, pada penelitian ini penulis hanya fokus pada aset daerah berupa Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru. adapun teori yang penulis gunakan yaitu teori koordinasi dan pengawasan.

a. Koordinasi Pemerintahan

Menurut Leonard D. White. *Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of part in time so that each can make it maximum contribution to the product of the whole.* (Penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan, serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil). Lalu menurut James D. Mooney, *Coordination is the orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose.* (Koordinasi adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama).⁵ Melihat pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur koordinasi meliputi :⁶

1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama

Penulis berpendapat bahwa dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindih pekerjaan. Oleh sebab tidak adanya koordinasi, kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan demi tujuan dan kepentingan bersama.⁷

b. Pengawasan

Menurut simbolon, pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan

ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut :⁸

1. Rencana (planning) yang harus ditentukan
2. Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance)
3. Tujuan
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut simbolon pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Koordinasi Pemerintahan

Berdasarkan aspek manajemen, pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi dalam hubungan pemerintahan. Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya.¹⁰ Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang ada pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya.¹¹ Menurut Ndraha (2000: 78-79), pemerintah memiliki dua fungsi dasar,

⁵ Inu Kencana Syafie, Ilmu Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm 88

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm. 89

⁸ Maringan Masry Simbolon. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Hlm 61

⁹ *Ibid.*, hlm. 62

¹⁰ Rasyid, Pemerintahan yang Amanah, Jakarta: Binarena Pariwara, 1998, hlm. 38.

¹¹ Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 34.

yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara itu fungsi sekunder yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.¹²

Untuk melihat faktor penghambat dari pelaksanaan tugas BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan JPO, peneliti menggunakan teori dari Atmosoeparto (dalam Hessel Nogi, 2005:181)¹³ yakni terdapat faktor internal dan eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja organisasi.

A5. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebagai sebuah tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴ Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.¹⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Mardalis, Metode Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada¹⁶. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan tentang pelaksanaan fungsi BPKAD dalam pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru Tahun 2018 secara aktual sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana adanya.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B1. Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang

1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan BPKAD dalam pengelolaan aset daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah

Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang sebagian besar terdapat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dan pihak swasta, dan selebihnya ada dibuat dokumen-dokumen pendukung.

¹² Ibid., hlm 36.

¹³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm 181.

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta: 2008, Hal. 24

¹⁵ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 14

¹⁶ Drs. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:2004,PT. Bumi Aksara), hlm. 26

BPKAD Kota Pekanbaru tidak merumuskan Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam pengelolaan Jembatan penyeberangan Orang ke dalam Renstra atau Renja. Renja dan Renstra BPKAD Kota Pekanbaru hanya membahas secara umum tentang pengelolaan aset daerah, tidak mengkhususkan pada JPO.

2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dalam pengelolaan aset daerah.

a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan

Dalam pengelolaan Jembatan penyeberangan Orang. BPKAD Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Dishub Kota Pekanbaru dan Pihak Swasta. BPKAD Kota Pekanbaru berperan sebagai koordinator, Dishub Kota Pekanbaru dan pihak swasta menjadi pihak-pihak yang di koordinir. Adapun unsur koordinasi meliputi:

1. Pengaturan

BPKAD Kota Pekanbaru yang berperan sebagai koordinator merupakan pihak yang berstatus sebagai pengelola barang, Dishub Kota Pekanbaru sebagai pengguna barang, lalu pihak swasta sebagai penyewa barang, adapun barang yang dimaksud adalah Jembatan penyeberangan Orang. BPKAD sebagai pengelola barang mempunyai kuasa penuh terhadap JPO, ditetapkannya status Dishub Kota Pekanbaru sebagai pengguna barang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dari BPKAD, adapun tugas utamanya yakni mengawasi keadaan/kondisi JPO lalu melaporkannya kepada BPKAD Kota Pekanbaru. Peran

pihak swasta juga sangat penting karena mereka semua yang telah membangun JPO, setelah mendapatkan izin pembangunan dari Pemko Pekanbaru, pihak swasta mempunyai masa kontrak 5 tahun dan setelah itu wajib menyerahkan kepemilikan JPO kepada Pemko untuk dicatat sebagai aset daerah, dengan catatan bahwa dalam masa kontrak tersebut pihak swasta wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap JPO.

Pihak swasta juga bisa memegang kuasa atas JPO apabila sedang dalam masa penyewaan yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama. Setelah masa kontrak atas pembangunan JPO habis, pihak swasta bisa memegang kuasa atas JPO lagi dengan cara menyewa JPO tersebut. Namun tidak semua perjanjian kerjasama berhasil diarsipkan, tidak sedikit juga perjanjian kerjasama yang hilang, hal ini membuat koordinasi dalam pengelolaan JPO tidak optimal, adapun PKS yang sudah diamankan hanya 7.

2. Sinkronisasi

Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi saat berjalannya beberapa tugas yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dalam berkoordinasi, masing masing pihak mempunyai tugas tersendiri yang mana harus disesuaikan satu sama lain agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dalam pengelolaan JPO, sinkronisasi tugas erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama/MOU, karena disana sudah ditetapkan tugas masing-masing pihak. Akan tetapi tidak semua pihak mengindahkan tugas yang telah ditetapkan, banyak pihak swasta yang tidak patuh dengan perjanjian kerjasama mereka dengan Pemko.

3. Kepentingan Bersama

Dalam koordinasi pemerintahan masing-masing pihak mempunyai tugas yang berbeda namun harus sejalan dengan kepentingan bersama. Adanya Jembatan Penyeberangan Orang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, disinilah pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan fasilitas itu.

4. Tujuan Bersama

Jembatan Penyeberangan Orang merupakan salah satu fasilitas yang melengkapi tata tertib lalu lintas negara ini, tujuan adanya fasilitas pejalan kaki adalah menjamin tingkat keamanan para pejalan kaki. Tujuan bersama lainnya yang harus dicapai adalah membuat JPO tetap terawat. Pihak swasta yang telah berkewajiban mengelola JPO wajib bertanggung jawab atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Namun pada kenyataannya masih banyak pihak swasta yang melanggar PKS. Tujuan Pengadaan Jembatan Penyeberangan orang juga tertera dalam perjanjian kerjasamanya, yaitu “untuk membantu kelancaran berlalu lintas dengan memberikan pelayanan penyeberangan kepada masyarakat dan untuk membantu pemerintah dalam menjaga Jembatan Penyeberangan Orang dalam upaya memberikan kemudahan dan berdisiplin bagi masyarakat dalam berlalu lintas”.

b. Penerimaan

Berdasarkan perjanjian kerja sama pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang antara Pemerintah Kota dan pihak swasta, Jembatan Penyeberangan orang harus diserahkan kepala pemerintah kota agar dicatat sebagai aset daerah oleh BPKAD Kota Pekanbaru 5 tahun setelah Jembatan Penyeberangan Orang tersebut dibangun. Berdasarkan tahun pembangunannya, maka seharusnya seluruh Jembatan Penyeberangan Orang

Telah menjadi Aset daerah Kota Pekanbaru.

c. Penggunaan

Setelah di tetapkan sebagai pengguna barang, Dishub Kota Pekanbaru mempunyai tugas khususnya mengawasi Jembatan Penyeberangan orang ataupun memeriksa kondisi Jembatan Penyeberangan Orang. Apabila ditemukan kerusakan pada Jembatan Penyeberangan Orang yang sedang dalam masa sewa. Maka Dishub Kota Pekanbaru melapor kepada BPKAD Kota Pekanbaru agar kemudian di buat surat peringatan kepada pihak swasta yang menyewa Jembatan Penyeberangan Orang tersebut.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan Orang dilakukan oleh BPKAD dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. Dengan adanya pihak swasta yang menyewa, mereka akan membayar sewa sebesar 20 juta pertahun. Pihak swasta yang akan menyewa wajib menyetorkan pembayaran uang sewa ke Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru secara tunai paling lambat 2 hari sebelum di tandatangani perjanjian sewa menyewa. Pembayaran dilakukan dengan kwitansi pembayaran atau bukti setoran atau surat lain yang dapat disamakan dengan itu. Priodesitas pembayaran sewa terhadap pemanfaatan Jembatan Penyeberangan Orang dilakukan setiap 1 tahun.

Jangka waktu sewa Jembatan Penyeberangan Orang oleh pihak swasta adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Dengan demikian pemko sudah mendapatkan pemasukan dana sebesar 100 juta dalam 5 tahun dari hasil penyewaan Jembatan Penyeberangan Orang. Pemerintah kota pekanbaru juga memperbolehkan apabila pihak ketiga ingin memperpanjang waktu penyewaan Jembatan Penyeberangan Orang, dengan syarat pihak kedua harus mengajukan permohonan perpanjangan 60

hari sebelum berakhirnya perjanjian. Dan apabila pihak swasta ingin mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, maka terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemko selambat-lambatnya 60 hari sebelum berakhirnya perjanjian.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

BPKAD Kota Pekanbaru selaku pengelola barang melakukan pengamanan Jembatan Penyeberangan Orang dengan menyimpan dokumen-dokumen Jembatan Penyeberangan Orang. Dalam hal pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang, Pemerintah Kota tidak menyediakan anggaran sama sekali sehingga sangat ketergantungan dengan bantuan dari pihak swasta. Jika ada anggaran BPKAD Kota Pekanbaru bisa saja melakukan pemeliharaan apabila Jembatan Penyeberangan Orang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kota atau sudah tercatat sebagai aset daerah. Lalu BPKAD Kota Pekanbaru juga bisa melakukan pemeliharaan apabila Jembatan Penyeberangan Orang sedang tidak masa sewa menyewa dengan pihak swasta.

f. Penghapusan

11 Jembatan Penyeberangan Orang jika dilihat secara normatif sebenarnya sudah ada yang bisa dihapuskan. Penyebab utamanya adalah karena dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama yang tidak lengkap dan kondisi Jembatan Penyeberangan Orang yang sudah tidak layak lagi, tapi pemerintah kota terlalu berharap bantuan dari pihak swasta.

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Dalam hal ini, BPKAD Kota Pekanbaru hanya melaksanakan fungsi pengawasan saja. pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut :

1. Rencana (planning) yang harus ditentukan

2. Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance)

3. Tujuan

4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Berdasarkan 4 pedoman pengawasan diatas. BPKAD Kota Pekanbaru tidak memiliki hambatan dalam mengawasi JPO, masalahnya adalah BPKAD Kota Pekanbaru tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut karena tidak adanya anggaran. Dinas perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pengguna barang dari 3 JPO yang juga bertugas mengawasi JPO telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Perencanaan dalam mengawasi JPO sudah ditetapkan dan langsung merangkap dengan perintah terhadap pelaksanaan kerjasama, yang dimuat dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 648 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018. Tujuannya jelas untuk mengawasi kondisi/keadaan JPO dan melaporkan kepada BPKAD Kota Pekanbaru. Dan semua hal yang dilakukan Dishub Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. BPKAD Kota Pekanbaru telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sudah dilakukan, tapi dalam hal penertiban masih belum optimal dikarenakan Pemko masih membutuhkan bantuan biaya dari Pihak Swasta untuk pengelolaan JPO.

h. Pembiayaan dan tuntutan ganti rugi

Apabila terjadi kerusakan terhadap Jembatan Penyeberangan Orang yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Maka langkah pertama yang diambil adalah penyelesaian secara musyawarah mufakat, sebagaimana tercantum dalam perjanjian

kerjasama. Jika Jembatan Penyeberangan Orang yang mengalami kerusakan masih dalam masa penyewaan, maka BPKAD Kota Pekanbaru melayangkan surat peringatan maksimal sebanyak 3 kali kepada pihak swasta yang bertanggung jawab memelihara Jembatan Penyeberangan Orang. Apabila dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak harus setuju menyelesaikan melalui pengadilan.

Kerusakan terhadap Jembatan Penyeberangan orang juga sering diakibatkan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang sengaja mengambil besi-besi Jembatan Penyeberangan orang untuk keperluan pribadi. Pengawasan terhadap 11 Jembatan Penyeberangan Orang juga kurang maksimal. Dishub Kota Pekanbaru hanya bisa mengawasi 3 JPO saja, yakni JPO yang sudah sah menjadi aset Pemko yang sudah ditetapkan status penggunaannya kepada Dishub Kota Pekanbaru.

3. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pembukuan

Pada tahun 2018 hanya 3 Jembatan Penyeberangan Orang yang ditetapkan sebagai aset daerah dan setelah itu langsung ditetapkan status penggunaannya menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Inventarisasi dan pelaporan

BPKAD Kota Pekanbaru melakukan inventarisasi ketika dokumen terkait Jembatan Penyeberangan Orang sudah lengkap. Tapi sejauh ini BPKAD Kota Pekanbaru belum melaksanakan pelaporan secara detail seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kode barang akan diterbitkan setelah Jembatan Penyeberangan Orang telah sah menjadi

aset daerah, yang di buktikan dengan adanya berita acara serah terima antara pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak swasta yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan pengamanan dokumen kepemilikan, penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian aset daerah.

BPKAD Kota Pekanbaru melaksanakan pengamanan dokumen kepemilikan terhadap Jembatan Penyeberangan orang, sebagaimana yang diharuskan oleh Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Tetapi belum semua Jembatan Penyeberangan Orang yang sudah jelas status kepemilikannya, karena sebagian besar masih dalam proses serah terima.

Dalam hal penghapusan, sampai saat ini belum ada Jembatan Penyeberangan Orang yang di hapuskan dari daftar Aset Daerah Kota Pekanbaru, hal ini karena Jembatan Penyeberangan Orang masih bernilai guna, baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak ketiga. Bagi masyarakat, Jembatan Penyeberangan Orang masih sangat diperlukan untuk keselamatan mereka yang hendak menyeberang jalan. Kemudian pemerintah Kota Pekanbaru bisa meraup keuntungan dari pihak ketiga yang menyewa Jembatan Penyeberangan Orang dan pemerintah bisa membantu rakyat tanpa mengeluarkan dana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang. Lalu pihak ketiga juga meraup keuntungan karena bisa memasang iklan di Jembatan Penyeberangan Orang tersebut.

Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang, yakni BPKAD Kota Pekanbaru. Berikut adalah

kelengkapan perjanjian kerjasama
Jembatan Penyeberangan Orang di Kota
Pekanbaru Tahun 2018.

Tabel 3.5
Status Jembatan Penyeberangan Orang
di Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Posisi JPO	Status
1	Modelux	Ada PKS
2	Plaza Sukaramai	PKS sedang proses
3	Rs. Awal Bros	Ada PKS dan PSM
4	Sudirman Square	PKS sedang proses
5	Ratu Mayang G	Belum ada PKS
6	GOR MTQ	PKS sedang proses
7	Toko Hawaii	Belum ada PKS
8	simpang Jl. Pelajar	Ada PKS
9	Giant Panam	Belum ada PKS
10	SD Tabek Gadang	PKS sedang proses
11	Tabek Gadang	Belum ada PKS

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru tahun 2018

B2. Faktor Penghambat Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam BPKAD Kota Pekanbaru. Adapun faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan tugas BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya anggaran untuk pengelolaan JPO

Tidak adanya anggaran menyebabkan BPKAD Kota Pekanbaru tidak bisa turun langsung dalam melakukan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang ketika tidak ada pihak swasta yang sedang menyewa 3 Jembatan Penyeberangan Orang yang disebutkan pada tabel diatas, itu yang menyebabkan terjadinya kerusakan

pada Jembatan Penyeberangan Orang. Apabila ada pihak swasta yang sedang menyewa, BPKAD Kota Pekanbaru yang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya mengawasi kondisi Jembatan Penyeberangan Orang saja, lalu kemudian BPKAD Kota Pekanbaru membuat surat teguran kepada pihak swasta yang tidak bertanggung jawab.

- b. Surat-surat kepemilikan JPO tidak lengkap

Hal ini dikarenakan lalainya BPKAD Kota Pekanbaru dalam mengamankan surat-surat tersebut. Ditambah lagi karena semua Jembatan Penyeberangan Orang yang ada di Kota Pekanbaru sudah lama dibangun, jadi kemungkinan kehilangan surat-surat penting terkait Jembatan Penyeberangan Orang sangat besar. Ada 8 Jembatan Penyeberangan Orang yang tidak lengkap surat-suratnya.

Tidak lengkapnya PKS/MOU Jembatan Penyeberangan Orang tentunya menghambat proses serah terima JPO, karena sebelum dibuatnya berita acara serah terima tentu saja memerlukan dasar kepemilikan yang kuat. Untuk saat ini baru 2 Jembatan Penyeberangan Orang yang PKS/MOU nya sedang di proses, sedangkan 4 lainnya belum ada progress dikarenakan belum adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kota dan pihak swasta.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar BPKAD Kota Pekanbaru. Adapun faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan tugas BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pihak swasta tidak mematuhi perjanjian kerja sama

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tidak bisa mengesahkan Jembatan Penyeberangan Orang menjadi aset daerah apabila pihak swasta yang membangun Jembatan Penyeberangan Orang belum menyerahkannya secara sah dimata hukum, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara serah terima oleh kedua pihak.

Pemerintah Kota Pekanbaru terkesan terlalu mengandalkan dana dari pihak swasta, sehingga masih ragu untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kerjasama “apabila dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak timbulnya perselisihan ini tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui pengadilan, dan para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Kelas 1A di Kota Pekanbaru.

C. PENUTUP

C1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti rangkum, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawas Pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru belum optimal. Inisiatif pengadaan JPO harusnya berawal dari pihak pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi pada kenyataannya inisiatif itu malah berawal dari pihak swasta, yang didasari dengan perjanjian kerjasama. Pihak Pemko cenderung terlalu mengharapakan bantuan dari pihak swasta.
2. Faktor-faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam

pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru adalah :

- Faktor Internal :
 - a. Tidak adanya anggaran yang disediakan pemerintah Kota Pekanbaru.
 - b. Surat-surat kepemilikan JPO tidak lengkap
- Faktor Eksternal
 - a. Pihak swasta tidak mematuhi perjanjian kerja sama

C2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran:

1. Untuk BPKAD Kota Pekanbaru agar lebih berupaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dalam pengelolaan sampah JPO, meningkatkan koordinasi dan pengawasan, memfasilitasi sarana dan prasana yang memadai, serta selalu memperhatikan permasalahan pada kegiatan operasional dilapangan.
2. Untuk Pengawas kondisi fisik JPO agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.
3. Untuk pihak swasta agar lebih bertanggung jawab dan patuh terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.
4. Untuk masyarakat agar senantiasa menggunakan JPO ketika menyeberang jalan, dan tetap menganggap bahwa JPO merupakan fasilitas penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi, 2008 . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: Kencana
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Koswara, E. 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta : IIP Press
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Pemerintahan yang Amanah*, Jakarta: Binarena Pariwisata
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Morrissa dan andy corry wardhani. 2010. *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Ghara Indonesia.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Grama Ilmu
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sangadji, Etta Mamang dan Sophia. 2010 *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta
- Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Jurnal

- Azmy, M. F., & Martosenjoyo, T. 2011. *Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Makassar*. (5): 2
- Harahap, H. H. 2014. *Analisa Karakteristik Penggunaan Jembatan Penyeberangan pada Daerah Perbelanjaan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Palembang*. 2(1)
- Koswara, E. S. dkk. 2014. *Efektifitas Penggunaan Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) (Studi Kasus pada Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang di Jl. Soekarno Hatta Bandung)*. 13(1): 2
- Lutfy, R. 2014. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Sudirman)*. Jom Fisip. 4(2): 2
- Nizam, M. T. 2016. *Persepsi Masyarakat tentang alternatif pemecahan masalah transportasi di Jalan Riau Kota Pekanbaru*. Jurnal Teknik Sipil Unaya. 2(1): 2.

Skripsi

- Irawanty, R. E. 2018. *Pengelolaan aset daerah di DPRD Kab. Inhil Periode 2009-2014*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau. Pekanbaru
- Elfiandi, Era. 2013. *Pelaksanaan Kebijakan Mengenai Fasilitas*

Pejalan Kaki di Kota Pekanbaru
Tahun 2013. Skripsi Ilmu
Pemerintahan. Universitas Riau.
Pekanbaru